



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.  
KANTOR WILAYAH PAPUA**

## **PENGUATAN AKUNTABILITAS**

### **2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**

**d. Indikator Kinerja Telah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*)**

**Data Dukung:**

- 1) Dokumen IKU Yang Mengandung Prinsip SMAR (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely*)**
- 2) Dokumen IKU Tambahan Yang Spesifik (Pelayanan Publik dan Anti Korupsi), Terukur, Dapat Dicapai, Realistis, dan Dengan Waktu Yang Jelas**

**Tahun 2020**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH PAPUA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

**NOMOR : W.30 - 037.PR.01.03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012;

4. Peraturan Presiden . . .

4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 28 April 2015, tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA.**

**KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Papua yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini.

**KEDUA :** IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategi, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 16 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Drs. MURDJITO SASTO, M.Si  
NIP. 19601231 199003 1 003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA  
 NOMOR : W.30-037.PR.01.03 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN  
 HUKUM DAN HAM PAPUA

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua 2. Nilai reformasi birokrasi 3. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Survey internal;  Penilaian oleh jejend Penilaian oleh jejend	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat (pengunjung, instansi terkait dan penghuni / WBP) terhadap layanan pemasyarakatan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat		Kepala Divisi Pemasarakatan

		<p>(pengunjung, instansi terkait dan penghuni/WBP) dalam memperoleh layanan masyarakat dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan (Rutan/Lapas/Bapas/Rupbaas an/LPKA) secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat selanjutnya.</p>		
<p>Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat</p>	<p>Menurunnya persentase residivis</p>	<p>Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali kedalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan masyarakat dalam membina, menyadari yang baik dan bertekad dalam memperbaiki diri, hidup secara wajar sebagai warga yang baik</p>		<p>Kepala Divisi Masyarakat</p>

		<p>dan bertanggungjawab. Semakin kecil angka residivis maka kinerja masyarakat semakin baik. Formula perhitungan : Jumlah narapidana residivis dibagi dengan total narapidana dikali seratus persen kemudian selisih antara hasil tersebut dibandingkan hasil persentase sebelumnya</p>		Kepala Divisi Masyarakat
<p>Meningkatkan Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat Menuju Manusia Mandiri</p>	<p>Persentase narapidana/anak dan Klien masyarakat yang berdaya guna setelah bebas</p>	<p>Persentase narapidana/anak dan Klien masyarakat yang berdaya guna setelah bebas adalah angka perbandingan narapidana/anak dan Klien masyarakat yang sudah dan berhasil meneruskan pendidikan, bekerja, berwirausaha atau dapat menghidupi diri sendiri dan/atau keluarga dengan dengan total narapidana yang bebas semakin tinggi angka yang menunjukkan narapidana/anak dan Klien masyarakat yang berdaya guna setelah bebas maka kinerja Divisi Masyarakat semakin baik</p>		Kepala Divisi Imigrasi
<p>Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian</p>	<p>1. Indeks kepuasan masyarakat terakhir layanan keimigrasian</p>	<p>Survey eksternal</p>		Kepala Divisi Imigrasi

	<p>2. Peningkatkan kemudahan pelayanan paspor bagi WNI</p> <p>3. Peningkatan kemudahan pelayanan izin tinggal WNA</p>	<p>Jenis pelayanan yang ditetapkan, aplikasi online, anjungan paspor</p> <p>Jenis pelayanan yang diterapkan, aplikasi izin tinggal online</p> <p>Perbandingan data setiap tahunnya</p>		<p>Kepala Divisi Imigrasi</p>
<p>Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian</p>	<p>Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian sesuai ketentuan</p>	<p>Survey masyarakat pengguna layanan AHU</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Meningkatnya Layanan AHU Online Yang Berkepastian Hukum</p>	<p>Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi hukum umum</p> <p>Persentase implementasi layanan AHU online yang berkepastian hukum</p>	<p>Jumlah permohonan layanan AHU online yang diselesaikan dibagi dengan target permohonan layanan di AHU online</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Terwujudnya Penyebaran Informasi Mengenai Layanan AHU di Papua</p>	<p>Persentase tersebarnya informasi layanan AHU diseluruh Indonesia oleh satuan kerja di Papua</p>	<p>Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja program AHU di Wilayah dibagi target sosialisasi yang dilaksanakan di Papua</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Terciptanya Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Yang Berkualitas Baik Sekali</p>	<p>Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua</p>	<p>Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Meningkatkan Kebijakan Pembangunan Yang Berperspektif HAM</p>	<p>Persentase Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan program aksi HAM</p> <p>Jumlah kabupaten/kota peduli HAM</p>	<p>Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan program aksi HAM</p> <p>Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penilaian</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>



	<p>Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait</p>	<p>kabupaten/kota peduli HAM sebagaimana tercantum dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM</p> <p>Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait</p>		<p>Kepala Bidang Hak Asasi Manusia</p>
<p>Termantfaatkannya rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>	<p><math display="block">\frac{\sum \text{rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\sum \text{rekomendasi bahan litbang Hukum dan HAM}} \times 100\%</math></p> <p>target : 20%</p> <p>target : 1 buku</p>		
<p>pembentukan hukum yang berkualitas</p>	<p>Persentase rancangan daerah undangan yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan</p> <p>Persentase tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Papua yang mendapatkan pembinaan</p>	<p><math display="block">= \frac{\text{Raperda selesai dibentuk}}{\text{Permohonan}} \times 100\%</math></p> <p><math display="block">= \frac{\text{Permohonan}}{\text{Jumlah Perancang PUU}} \times 100\%</math></p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>

	<p>Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di Papua yang mendapatkan pembinaan substansi perancangan peraturan daerah</p>	<p>25 Orang</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Hukum di Tingkat Daerah Dengan Di Dukung Perencanaan Hukum di Tingkat Daerah; Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah</p>	<p>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi</p> <p>Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/masyarakat miskin</p> <p>Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah</p>	<p>Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi dalam perkara perdata, pidana dan TUN</p> <p>Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang/masyarakat miskin</p> <p>Jumlah pelaksanaan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 PP No. 42 Tahun 2013</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>
<p>Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum dan serta tersedianya dokumentasi</p>	<p>Jumlah penyuluh hukum di Daerah</p> <p>Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah</p> <p>Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDHIN</p>	<p>Jumlah penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum daerah</p> <p>Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah</p> <p>Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDHIN</p>		<p>Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</p>

	Pelatihan/peningkatan kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	Jumlah OBH dan Paralegal (Tematik) yang mendapatkan pelatihan / peningkatan kapasitas		Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Terciptanya Layanan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah yang Berkualitas Baik Sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua  Presentase penyelenggaraan dan diseminasi di Daerah Papua  Presentasi penyelenggaraan penegakan hukum di Daerah Papua  Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal di Daerah Papua	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima Kantor Wilayah dibagi jumlah permohonan tahun sebelumnya  Jumlah penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah dibagi jumlah promosi dan diseminasi tahun sebelumnya  Jumlah penegakan hukum di daerah dibagi jumlah perkara yang masuk  Jumlah kekayaan intelektual komunal yang berhasil diinput dalam database dibagi data tahun sebelumnya		
Meningkatnya Kebijakan Pembangunan Yang Berperspektif HAM	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan program aksi HAM  Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan program aksi HAM  Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penilaian		

	<p>Jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait</p>	<p>kabupaten/kota peduli HAM sebagaimana tercantum di dalam Permenkumham Nomor 34 Tahun 2016 tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli HAM</p> <p>Persentase rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait</p>		
<p>Termantaukannya Rekomendasi Hasil Kajian Wilayah Dalam Penentuan Tema Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</p> <p>Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</p>	<p> <math display="block">\frac{\sum \text{rekomendasi hasil kajian di wilayah}}{\sum \text{rekomendasi bahan litbang Hukum dan HAM}} \times 100\%</math> </p> <p>target : 20%</p> <p>targe : 1 buku</p>		

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Drs. MURDJITO SASTO, M.Si  
NIP. 19601231 199003 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA**

<b>KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN</b>	<b>PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>KETERANGAN/ PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Nilai Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang membangun Zona Integritas dengan mengimplementasikan area perubahan reformasi birokrasi sehingga diusulkan mendapatkan predikat WBK oleh TPI	Jumlah unit kerja yang memperoleh IPK minimal 13,5; minimal IKM 16; dan TLHP minimal 4,5	Tim Kerja Pembangunan	Kepala Divisi Administrasi

Jayapura, 16 Januari 2020  
**KEPALA KANTOR WILAYAH,**



**Drs. MURDITO SASTO, M.Si**  
**NIP. 19601231 199003 1 003**